

Terekam CCTV, Curi Uang Pelaku Bawa Anak

WATES (KR) - Uang tunai yang ditaruh dalam tas milik Kasijem (58) warga Trimurti, Srandakan, Bantul hilang dicuri, Jumat (4/12) siang. Aksi pencurian terjadi di depan sebuah toko kelontong di wilayah Pedukuhan I Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur. Kasubbag Humas Polres Kulonprogo, Iptu I Nengah Jeffry saat dikonfirmasi KR, Minggu (6/12) membenarkan adanya laporan kejadian itu. Aksi pelaku terekam kamera

CCTV toko. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku membawa seorang anak dan beraksi sekitar pukul 11.30. Kronologinya, bermula saat korban memarkir sepeda motor didepan toko. Pelaku memanfaatkan kesempatan saat korban masuk ke dalam toko. Pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp 800.000 dari tas korban yang berada dalam keranjang dagangan yang ditutupi plastik.

Saat korban kembali ke sepeda motor dan mengecek isi tas, ternyata uang tersebut sudah hilang. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galur. "Petugas yang mendapat laporan langsung ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Kejadian pencurian ini terekam kamera CCTV yang terpasang di sekitar toko. Kasus ini masih dalam penyelidikan untuk mengungkap pelakunya," jelasnya. **(M-4)-f**

Dua Residivis Gasak 'Ninja'

SLEMAN (KR) - Penjara tak membuat S (38) warga Batang Jawa Tengah jera, bahkan kembali melakukan kejahatan. Residivis tersebut, menggasak motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6972 RY milik Agung Setia (21) warga Purworejo yang bekerja di toko buah daerah Karang Kalasan Tirtomartani, Kalasan Sleman. Kapolsek Kalasan Kumpul

Sumantri didampingi Kanit Reskrim Iptu Purwanto, Minggu (6/11), mengatakan tersangka S ditangkap di Sentolo, Kulonprogo. Terungkapnya kasus itu setelah korban melaporkan kasusnya ke Mapolsek Kalasan. "Korban melapor kehilangan motor saat di parkir di garasi toko buah tempatnya bekerja. Kejadian itu diketahui saat kor-

ban hendak salat Subuh," ungkapnya. Pada saat bersamaan, petugas mendapatkan informasi jika motor dengan ciri-ciri seperti punya korban, ditawarkan melalui media sosial oleh seseorang. Petugas kemudian pura-pura hendak membelinya dan perjanjian dengan orang tersebut di wilayah Sentolo Kulonprogo. Petugas berhasil mengamankan S dengan bukti motor curian. Saat didegred di rumahnya, petugas menemukan motor yang diduga tindak pidana TKP lain. Kepada petugas, tersangka S mengaku saat beraksi bersama temannya, D yang kini masih dalam pencarian. Keduanya, merupakan teman saat sama-sama berada di penjara. Saat beraksi mencuri motor Agung, tersangka S bertindak sebagai joki, sedangkan D eksekutor. **(Ayu)-f**



KR-Wahyu Priyanti.

Tersangka S ditangkap dengan bukti motor hasil curian.

KPK Sambungan hal 1

la dijerat bersama empat orang lainnya, yakni Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM dan Harry Sidabuke. Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

Sebelum dilakukan penahanan, dua tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan suap terkait bansos untuk wilayah Jabodetabek ini, JPB dan AW, telah menyerahkan diri. Tersangka JPB menyerahkan diri ke KPK pada Minggu (6/12) sekitar pukul 02.50 WIB. "Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka," kata Ketua KPK Firlu Bahuri.

Kelima tersangka itu, sebagai penerima adalah Mensos JPB, MJS dan AW. Sedangkan, sebagai pemberi AIM dan HS. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut, jelas Firlu, selanjutnya dikelola oleh Eko dan orang kepercayaan Juliari bernama Shelly untuk digunakan mem-

bayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Atas tindakan itu, tersangka penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara kepada JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. **(Ful)-f**

Juliari Sambungan hal 1

Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW). Sedangkan pemberi suap, yakni dua orang dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp 17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.

Pelaksana Tugas (Pit) Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penelusuran aliran dana dari kasus suap pengadaan bansos ini termasuk jika terdapat aliran dana ke partai politik tem-

pat Juliari bernaung. Juliari adalah Wakil Bendahara Umum PDIP.

Presiden Joko Widodo menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka. Presiden sudah menunjuk Menteri Koordinator Pembinaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Mensos.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. "Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan

perlu juga saya sampaikan, saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju Jangan korupsi!," tegas Presiden.

Ketua KPK Firlu Bahuri menilai Mensos telah mengabaikan berbagai peringatan yang disampaikan KPK untuk tidak melakukan korupsi. Termasuk dalam pengelolaan bansos di masa pandemi Covid-19.

"KPK selalu mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi," kata Firlu di Gedung KPK Jakarta. **(Ful/Sim/Ati)-f**

Pilkada Sambungan hal 1

Ibarat nasi sudah menjadi bubur. *Salus populi suprema lex esto*, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka, perlu langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan pilkada tetap berjalan sambil diupayakan langkah agar tidak ada kluster baru kasus positif Covid-19 Peraturan KPU No 6 Tahun 2020, KPU tampaknya sudah merumuskan berbagai langkah antisipasi agar pilkada tidak menjadi kluster baru. Berdasarkan *beleid* ini, langkah pencegahan penularan diupayakan melalui penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, pengecekan suhu tubuh, hingga disinfektasi peralatan-peralatan yang sering dipakai pada setiap tahapan pilkada. Namun, sebagaimana diketahui banyak pihak, kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada tahapan pilkada yang sudah tak seindah didengungkan. Masih banyak ditemukan pelanggaran.

Pelanggaran itu bisa saja terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum. Bisa pula karena belum adanya pemahaman yang memadai dari masyarakat sebagai akibat sosialisasi yang dilakukan pembentuk hukum belum maksimal. Adalah benar bahwa dalam hukum dikenal asas *presumptio iures de iure* (asas asas yang menganggap semua orang tahu hukum) atau yang bisa dikenal dengan fiksi hukum. Namun, asas ini tidak berdiri sendiri melainkan membutuhkan instrumen pendukung yakni sudah sejauhmana upaya sosialisasi tidak dilakukan oleh organ negara yang bertugas untuk itu agar masyarakat patuh. Jika dilihat dari optik teoritik, terdapat 2 (dua) madzhab teori

kepatuhan yang dikenal dengan madzhab pemaksaan dan madzhab konsensus (Soerjono Soekanto). Dalam madzhab teori pemaksaan, kepatuhan hukum muncul dari efektivitas dalam proses pemaksaan. Sedangkan pada madzhab teori konsensus, kepatuhan hukum muncul dari efektivitas melalui internalisasi dalam masyarakat.

Penulis menilai, ketidakpatuhan peserta pilkada terjadi karena, baik pemaksaan maupun konsensus belum optimal berjalan. Dalam kaitannya dengan pemaksaan, pelaksanaan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap tahapan pilkada (setidaknya) belum disertai dengan pelaksanaan sanksi yang memberikan efek jera bagi para pelanggar. Demi mengurangi dampak negatif pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, sekali lagi, penegakan hukum protokol kesehatan harus dilakukan. Pelaksanaan yang menyalakan tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pemenang masih sangat potensial memunculkan kerumunan dan potensial menjadi kluster baru. Tentu bukan itu yang diharapkan. Perlu kerja sama semua pihak (penyelenggara pilkada, pengawas, peserta, dan masyarakat) untuk bersama-sama menyelenggarakan pilkada dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Jika perlu, berlakukan sanksi yang tegas dan sesuai dengan koridor hukum atas setiap pelanggaran oleh siapapun tanpa pandang bulu. **(Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII/Kepala Pusat Studi Hukum FH UII)-f**

SMPN 1 Jetis Hangus Terbakar

BANTUL (KR) - Gedung SMPN 1 Jetis Bantul di Dusun Kertan Desa Sumberagung hangus terbakar, Minggu (6/12). Kerugian dari peristiwa itu masih dalam pendataan. Hingga kini kasus kebakaran gedung sekolah tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Merujuk data sementara, barang yang terbakar meliputi satu gedung, lima ruang kelas, 9 LCD, meja dan kursi, satu komputer, dua ruang lab IPA dan bahasa, ruang keterampilan, 16 kipas angin serta 36 lampu.

Kapolsek Jetis Polres Bantul Polda DIY, M Sholeh SH MM, mengatakan sekitar pukul 09.00 warga di sawah atau sisi selatan sekolah melihat kobaran api dan kepulan asap hitam pekat membung tinggi dari salah satu gudang SMPN 1 Jetis Bantul. Melihat hal tersebut, warga berusaha memadamkan api. Tapi perjuangan warga tidak mudah lantaran api sudah terlalu besar. Sementara petugas Polsek Jetis yang datang ke SMPN 1

Jetis tidak bisa langsung masuk karena pintu pagar terkunci. Sekitar pukul 10.30, sumber api dapat dipadamkan meng-

gunakan 2 unit mobil damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul.



KR-Istimewa

Regu pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Bantul berusaha menjinakkan api di SMPN 1 Jetis Bantul.

Kawanan Rampok Ditembak Polisi

SLAWI (KR) - Sedikitnya 4 dari 6 perampok yang kerap melukai korban, berhasil diringkus petugas Satreskrim Polres Tegal. Empat pelaku itu terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Saat ini tersangka yang masih diperiksa tersebut adalah HM (44) warga Sekaran Lamongan, HS (44) warga Cengkareng Jakarta Barat, JP (45) warga Cileungsi Bogor dan MK (41) warga Kramat Jati Jakarta Timur.

Sementara pelaku lainnya masih buron. Kasat Reskrim Polres Tegal, AKP I Dewa Gede Ditya SIK, membenarkan penangkapan empat kawanan perampok itu. Mereka dilumpuhkan karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Diungkapkan, kawanan itu sempat

melancarkan aksi di wilayah hukum Polres Tegal, tepatnya di RT 14 RW 03 Desa Kebandingan Kedungbanteng. Dalam aksinya, mereka menguras harta korban yang ditaksir mencapai Rp 75 juta.

"Kawanan itu mengancam korban dengan senjata tajam. Untuk menangkap mereka dibutuhkan kerja keras dan kejelian petugas," tegas Ditya.

Saat beraksi, kawanan itu berangkat bersama-sama dari Jakarta sebagai titik kumpul sebelum menuju ke Kabupaten Tegal. Sampai di depan sebuah rumah mewah yang terlihat ada usahanya, mereka dilumpuhkan karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Diungkapkan, kawanan itu sempat

Saat itu, pemilik rumah terbangun dan memergoki aksi para tersangka. Sempat terjadi aksi saling dorong dengan kawanan itu. Pemilik rumah sempat terjatuh dan diancam para tersangka menggunakan parang dengan posisi kedua tangan terikat. "Saat itu korban bersama anaknya diikat tersangka dan diperintah menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang berharga," tutur Ditya.

Barang berharga yang dikuras kawanan itu berupa gelang emas ulir 25 gram, gelang emas 16 gram, cincin emas putih 5 gram, liontin 7 gram, kalung emas 7 gram, uang tunai Rp 40 juta, 2 unit ponsel dan STNK mobil berikut STNK sepeda motor beserta kuncinya. **(Ryd)-f**

KASUS POSITIF COVID-19 MENINGKAT

'Warning' bagi Penyelenggara Pilkada di DIY

YOGYA (KR) - Meningkatnya kasus positif di DIY, Minggu (6/12) sebanyak 224 orang menjadi peringatan bagi penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DIY. Karena itu, prosedur pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang, harus betul-betul ditegakkan.

Peringatan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, H Sukanto SH kepada KR, Minggu (6/12) setelah mencermati perkembangan terakhir penyebaran kasus Covid-19 di DIY. Untuk Pilkada Serentak 2020 ini, dilaksanakan tiga kabupaten di DIY yakni, Sleman, Bantul dan Gunungkidul. "Evaluasi sebelum pelaksanaan Pilkada diharapkan sudah dilakukan, sebelum pelaksanaan coblosan. Semoga semua sudah dipersiapkan dan diantisipasi," ujar Sukanto yang berasal dari Dapil DIY.

Dijelaskan Sukanto, Komisi II DPR RI sebetulnya telah mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 memiliki risiko yang cukup besar. Ada saran-saran dari berbagai pihak untuk menunda pelaksanaannya pada 2021. Namun



KR-Istimewa

H Sukanto SH

demikian, pemerintah telah melakukan pencermatan, sehingga memutuskan untuk melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2020. "Tentu keputusan tersebut membawa konsekuensi agar pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati, dan dengan menekankan pada penegakan protokol kesehatan. Jangan sampai saat memberikan suara, justru pemberi suara terpapar Covid-19. Demikian juga dengan petugas juga jangan sampai terpapar," ujarnya.

Pihaknya berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap kabupaten betul-betul bisa menjalankan perannya. Tidak hanya sukses dalam pelaksanaan Pilkada, tetapi juga bisa mencegah terjadinya kluster Pilkada.

Dalam kesempatan itu, anggota yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini juga mengingatkan agar proses pembelajaran tatap muka di sekolah tidak dibuka dulu pada Januari 2021. Meski pemerintah pusat telah memperbolehkan, namun pihaknya berharap Pemda DIY tidak buru-buru membukanya. **(Jon)-f**

Langgar Sambungan hal 1

"Satpol PP DIY akan membatalkan kegiatan, meskipun telah mengantongi izin dari Pemkot Yogyakarta misalnya, kalau dalam penyelenggaraan acara terbukti melanggar protokol kesehatan. Kami bersama Polda DIY, Polresta Yogyakarta serta Satpol PP Kota Yogya akan mendatangi dan menertibkan acara tersebut," ungkap Noviar.

Noviar tidak ingin hal itu terjadi, karenanya dalam menertibkan izin kegiatan, baik di level provinsi, kabupaten/kota,

bahkan sampai level desa, harus diseleksi dengan ketat. Terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan tidak bisa mematuhi protokol kesehatan, sebaiknya dikaji ulang.

"Saya berharap dalam penerbitan izin diseleksi betul karena kasus Covid-19 di DIY semakin tinggi dan sudah zona merah. Saya juga berharap seluruh komponen masyarakat baik pelaku kegiatan, pemilik usaha, maupun masyarakat perorangan betul-betul mem-

perketat protokol kesehatan. Tidak ada jalan lain kita harus menerapkan itu," tandas Noviar.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menyampaikan, kasus konfirmasi positif Covid-19 di DIY, Minggu kemarin mencatat angka penambahan harian tertinggi yakni 224 kasus. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi diumumkan. Dengan demikian, kini total kasus positif menjadi 6.956 kasus. **(Ria/Ira)-f**

Mendagri: ...

Sambungan hal 1

Untuk diketahui pemungutan suara dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada), pada 9 Desember 2020 sudah semakin dekat. Hal ini seiring dengan telah berakhirnya masa kampanye selama 71 hari pada tanggal 5 Desember lalu, dan saat ini memasuki masa tenang, 6 - 8 Desember.

Disampaikan Tito, masa tenang ini harus mendapat perhatian khusus semua pihak, baik oleh penyelenggara pilkada di tingkat pusat sampai daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama Forkompimda, aparat keamanan (TNI/Polri), partai politik, pasangan calon, maupun masyarakat pemilih. **(Sim/Ati)-f**

MULIA
AUTHORIZED MONEY CHANGER
www.muliamoneychanger.co.id

PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID - 19

GRAND INNA MALIOBORO HOTEL JL.MALIOBORO 60 YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB

PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND
TELP : 4331272
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB

JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA
TELP : 0274 - 5015000
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

TANGGAL 05/DES/2020

CURRENCY	BELI/		JUUAL
	BN	TC	
USD	14,050	-	14,300
EURO	17,050	-	17,350
AUD	10,375	-	10,575
GBP	18,850	-	19,250
CHF	15,700	-	16,000
SGD	10,550	-	10,850
JPY	134,50	-	139,50
MYR	3,400	-	3,600
SAR	3,675	-	3,975
YUAN	2,100	-	2,250

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah
Menerima hampir semua mata uang asing